



RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur nomor 90 tahun 2019.

Untuk menjabarkan tugas-tugas yang diembannya sebagaimana tersebut diatas, berpedoman pada Rencana Strategis 2018-2023 selanjutnya dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dicapai pada Tahun 2023 dan sekaligus merupakan tolak ukur keberhasilan dan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran 2023.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2023 perlu disusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang penyusunannya telah menyesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 90 tahun 2019. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan terhadap penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, Juni 2022
Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat

Ir. Anshridus Juliardi Andjioe, ME

Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199311 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I : PENDAHULUAN.....	3
1. 1. Latar Belakang.....	3
1. 2. Landasan Hukum.....	4
1. 3. Maksud dan Tujuan.....	6
1. 4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU..	8
2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	25
2. 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	33
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	34
3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	37
3. 3. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	40
BAB V : PENUTUP.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD). Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar tahun 2023 diawali dengan menjangking masukan/usulan kegiatan melalui forum OPD dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik Pembina Dinas KUMKM Provinsi/Kabupaten/Kota, Lintas instansi, Tokoh masyarakat, sehingga rencana program kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan provinsi sejalan dan mengakomodir Kabupaten kota dengan tetap memperhatikan asas prioritas, kebutuhan dan efisiensi dalam penganggaran. Dalam proses penyusunan rencana kerja yang selanjutnya dibahas dan diverifikasi oleh Bappeda mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar tahun 2018-2023. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka terjadi penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai pedoman tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu rencana kerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalbar

diupayakan tetap sinergi dengan rencana kerja Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait capaian target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahunnya. Selanjutnya rencana kerja tahunan dijadikan dasar dalam proses penyusunan RAPBD Provinsi Kalbar tahun 2023, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran yang cukup penting didalam upaya mewujudkan peningkatan dan pengembangan usaha KUMKM. Pengembangan KUMKM dilaksanakan dengan tujuan untuk memantapkan peran KUMKM melalui pengembangan kelembagaan KUMKM, membuka kesempatan usaha yang seluas-luasnya, meningkatkan kemampuan KUMKM didalam pemanfaatan sumber daya produktif, mengembangkan sikap kewirausahaan dan menumbuhkan wirausaha, serta meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen KUMKM, sehingga Koperasi menjadi berkualitas, UMKM menjadi naik kelas sesuai dengan indicator dan target yang telah ditentukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi sesuai tujuan dari visi, misi kepala daerah 2018-2023.

1. 2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.
19. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019;

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah untuk mengetahui dan menentukan :

1. Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
2. Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
3. Indikator Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat
4. Pagu Indikatif program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023
2. Mengevaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun sebelumnya
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun sebelumnya
4. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

1. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 adalah :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat merupakan penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Pelaksanaan Renja dikaitkan juga dengan pencapaian target Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini disajikan Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat pada tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/ kegiatan/ Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Ke ggiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
1.17.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		100%						
1.17.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman surat menyurat		150 berkas						
1.17.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan		4 rekening						
1.17.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Asuransi		2 polis						
1.17.01.01.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas		7 Mobil dan 4 Motor Dinas						
1.17.01.01.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek		750 lembar,5 buku						
1.17.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor		1 unit						
1.17.01.01.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		50 item						
1.17.01.01.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan		9 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan						
1.17.01.01.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		14 item						
1.17.01.01.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 item						
1.17.01.01.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 item						
1.17.01.01.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman		2.400 porsi						
1.17.01.01.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		1 dokumen						
1.17.01.01.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Jumlah Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan pendukung perkantoran lainnya		16 Orang						
1.17.01.01.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang		16 orang						

1.17.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	5 item						
1.17.01.01.01.18	Penataan dan Pemeliharaan Arsip	Jumlah arsip yang tertata	1 tahun						
1.17.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana kantor	100%						
1.17.01.01.02.01	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC / Kipas Angin	-						
1.17.01.01.02.02	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan perlengkapan peralatan kantor yang memadai	-						
1.17.01.01.02.04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi	-						
1.17.01.01.02.10	Pengadaan/Peningkatan Daya Listrik	Jumlah peningkatan daya listrik							
1.17.01.01.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi							
1.17.01.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah luas Gedung Kantor yang terpelihara	2000 M2						
1.17.01.01.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional	2 Mobil Dinas						
1.17.01.01.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara	130 Unit						
1.17.01.01.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan/peralatan kantor yang terpelihara	-						
1.17.01.01.02.22	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah sarana dan prasarana Studio dan komunikasi yang terpelihara	4 unit						
1.17.01.01.02.24	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	8 tabung						
1.17.01.01.02.42	Pengadaan Mebelair	Jumlah Mebelair	-						
1.17.01.01.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah Pengadaan Mesin Pompa Air	1 unit						
1.17.01.01.02.59	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jaringan Air	Jumlah Jaringan air yang terpelihara	1 paket						
1.17.01.01.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik/ Telepon	Jumlah instalasi listrik/ telepon yang terpelihara	1 paket						
1.17.01.01.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor	180 M2						
1.17.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%						
1.17.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas /Kerja dan Perlengkapannya	65 Orang						
1.17.01.01.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus dan Perlengkapannya	65 Orang						
1.17.01.01.03.03	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai	Jumlah Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai							
1.17.01.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%						

1.17.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah jenis Pendidikan dan Pelatihan	1 jenis						
1.17.01.01.05.02	Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	Jumlah jenis Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop	3 jenis						
1.17.01.01.05.04	Pembinaan Jasmani dan Rohani	Jumlah Jenis Pembinaan Jasmani dan Rohani	2 jenis						
1.17.01.01.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan	-						
1.17.01.01.05.06	Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja							
1.17.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang disusun tepat waktu	100%						
1.17.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	4 laporan						
1.17.01.01.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah laporan kinerja (LAKIP)	1 laporan						
1.17.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA	Jumlah RENSTRA	1 laporan						
1.17.01.01.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah RENJA	2 laporan						
1.17.01.01.06.05	Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ	Jumlah LPPD dan LKPJ	2 laporan						
1.17.01.01.06.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan Monev dan Pelaporan	1 laporan						
1.17.01.01.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah RKA dan DPA	2 laporan						
1.17.01.01.06.08	Penyusunan Perencanaan Teknis SKPD Tingkat Provinsi	Jumlah Rencana Teknis OPD	2 laporan						
1.17.01.01.06.09	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Evaluasi dan Penyerapan Anggaran							
1.17.01.01.06.10	Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Jumlah data Informasi dan Dokumentasi yang tersedia							
1.17.01.01.07	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	Presentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%						
1.17.01.01.07.01	Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Asset	Jumlah laporan inventarisasi Barang Milik Daerah	1 laporan						
1.17.01.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI								
1.17.01.01.15.01	Penguatan kelembagaan koperasi	Jumlah Koperasi aktif yang RAT	13 koperasi						
1.17.01.01.15.	Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	Jumlah SDM Koperasi Kab/Kota yang mengikuti Rakor Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	40 orang						
1.17.01.01.15.02	Penilaian koperasi berprestasi di tingkat provinsi	Jumlah Koperasi berprestasi di tingkat provinsi yang dinilai	56 koperasi						
1.17.01.01.15.	Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Kampanye Aktifitas Kelembagaan Koperasi	60 koperasi						
1.17.01.01.15.	Penyusunan Databased Koperasi Aktif	Jumlah Databased Koperasi Aktif							

	Terintegrasi se-Kalbar	Terintegrasi se-Kalbar								
1.17.01.01.15.	Pembinaan Koperasi dalam Pemanfaatan IT	Jumlah Koperasi yang diberikan Pembinaan dalam Pemanfaatan IT		60 koperasi						
1.17.01.01.15.03	Penguatan dan penumbuhan kader koperasi di Kalimantan Barat	Jumlah Kader Koperasi yang mendapatkan pemahaman tentang perkoperasian		200 orang						
1.17.01.01.15.04	Penilaian Koperasi Sekolah Berprestasi	Jumlah Koperasi Sekolah yang dinilai		28 koperasi sekolah						
1.17.01.01.15.05	Workshop koperasi sekolah	Jumlah pembina koperasi sekolah yang mengikuti workshop koperasi sekolah		-						
1.17.01.01.15.	Pemutahiran Data Koperasi	Jumlah laporan pemutahiran data koperasi		1 laporan						
1.17.01.01.15.06	Rapat Konsolidasi Pemutahiran data koperasi	Jumlah Pembina koperasi yang mengikuti pemutahiran data koperasi		-						
1.17.01.01.15.07	Peningkatan kapasitas pengelola data koperasi	Jumlah SDM pengelola data koperasi yang mengikuti Peningkatan kapasitas pengelola data koperasi		30 orang Prov/Kab/ Kota						
1.17.01.01.15.	Bimtek Online Data System bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	Jumlah PPKL yang mengikuti Bimtek Online Data System bagi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan		41 orang						
1.17.01.01.15.08	Rapat konsolidasi pengawasan koperasi	Jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang mengikuti Rapat konsolidasi pengawasan koperasi		120 orang						
1.17.01.01.15.09	Rapat teknis pengawasan koperasi	Jumlah pengawas Pembina koperasi kabupaten/kota yang mengikuti Rapat teknis pengawasan koperasi		35 Orang						
1.17.01.01.15.10	Monev Penerapan Kepatuhan Koperasi	Jumlah Dokumen hasil monev penerapan Kepatuhan Koperasi		1 laporan						
1.17.01.01.15.	Sinergitas Pengawasan Koperasi	Jumlah petugas pengawas dan pengawasan koperasi yang mengikuti sinergitas		50 orang						
1.17.01.01.15.	Pengukuran tingkat kepatuhan koperasi badan hukum provinsi	Jumlah Koperasi yang dikukur kepatuhannya		80 koperasi						
1.17.01.01.15.11	Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi Badan Hukum Provinsi yang dinilai		50 koperasi						
1.17.01.01.15.12	Pemeriksaan Koperasi Badan Hukum Provinsi	Jumlah Koperasi Badan Hukum Provinsi yang diperiksa		30 koperasi						
1.17.01.01.15.13	Temu aksi Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengikuti Temu Aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Kab/Kota		160 koperasi						
1.17.01.01.15.	Temu aksi pengawas koperasi kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti Temu aksi pengawas koperasi kabupaten/kota		70 koperasi						
1.17.01.01.15.	Lomba kepatuhan koperasi tingkat Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah koperasi yang mengikuti Lomba kepatuhan koperasi tingkat Provinsi Kalimantan Barat		45 koperasi						

1.17.01.01.15.	Temu aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengikuti Temu aksi Penilaian Kesehatan dan Pengawasan Kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Kab/Kota		165 koperasi						
1.17.01.01.15.14	Bimtek Penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Petugas Penilai Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah petugas penilai Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang mengikuti Bimtek		35 orang						
1.17.01.01.15.15	Bimtek Penyusunan Proposal usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek penyusunan proposal usaha koperasi		-	-					
1.17.01.01.15.	Bimtek Pembiayaan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Bimtek Pembiayaan Usaha Koperasi		30 koperasi						
1.17.01.01.15.	Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil	Jumlah koperasi sektor riil yang mengikuti Bimtek Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil		15 koperasi						
1.17.01.01.15.	Pengembangan Usaha Koperasi Sektor Riil	Jumlah Koperasi sektor riil yang diberi pembinaan untuk pengembangan usaha		15 koperasi						
1.17.01.01.15.	Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi	Jumlah SDM pembina koperasi yang mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi		30 orang						
1.17.01.01.15.	Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi	Jumlah SDM pembina koperasi yang diberikan pembinaan kapasitas SDM		30 orang						
1.17.01.01.15.16	Advokasi kemitraan Koperasi Perkebunan	Jumlah koperasi perkebunan yang mengikuti Advokasi Kemitraan koperasi perkebunan		60 koperasi						
1.17.01.01.15.17	Pengembangan Koperasi nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim	Jumlah koperasi yang mengikuti pengembangan koperasi nelayan		20 koperasi						
1.17.01.01.15.18	Workshop Pembiayaan Koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti Workshop Pembiayaan koperasi		-	-	-				
1.17.01.01.15.19	Bimtek Pengembangan Koperasi Pertanian	Jumlah Koperasi Pertanian yang mengikuti Bimtek Pengembangan Koperasi Pertanian		20 koperasi						
1.17.01.01.15.	Pengembangan Koperasi Pertanian	Jumlah koperasi yang mengikuti Pengembangan Koperasi Pertanian		20 kopeasi						
1.17.01.01.15.20	Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)	Jumlah Koperasi yang mengikuti Workshop Membangun Koperasi Melalui Pembagian (Spin Off)		15 koperasi						
1.17.01.01.15.	Edukasi Membangun Koperasi Melalui Metode Pembagian (Spin Off)	Jumlah Koperasi yang mengikuti Workshop Membangun Koperasi Melalui Metode Pembagian (Spin Off)		15 koperasi						
1.17.01.01.15.21	Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas	Jumlah pembina koperasi yang mengikuti Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi Berkualitas		28 orang						
1.17.01.01.15.56	Rekonsiliasi pembiayaan usaha koperasi melalui dana bergulir	Jumlah Koperasi yang mengikuti Rekonsiliasi pembiayaan usaha koperasi melalui dana bergulir		30 koperasi						

1.17.01.01.16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM								
1.17.01.01.16.01	Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM	Jumlah pameran/promosi produk UKM							
1.17.01.01.16.	Pameran/Promosi Produk UKM	Jumlah pameran/promosi produk UKM		4 event					
1.17.01.01.16.	Penyusunan Data Base UMKM se Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen Data UMKM se Kalimantan Barat		1 dokumen					
1.17.01.01.16.02	Bimtek Wirausaha Pemula	Jumlah wirausaha pemula yang mengikuti bimtek		100 orang					
1.17.01.01.16.03	Rapat Teknis Konsolidasi Data UMKM se Kalbar	Jumlah Pembina UKM yang mengikuti Rapat Teknis Konsolidasi data UMKM se Kalbar		60 orang					
1.17.01.01.16.04	Penyusunan Katalog Produk Unggulan Daerah UKM	Jumlah Katalog Produk Unggulan Daerah UKM		1 buku					
1.17.01.01.16.05	Pemetaan Produk Unggulan Daerah	Jumlah Dokumen pemetaan produk unggulan daerah		-	-	-			
1.17.01.01.16.07	Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM	Jumlah UKM yang mengikuti Bimtek Penguatan Daya Saing Produk UKM							
1.17.01.01.16.10	Temu Bisnis Peningkatan Kerjasama Investasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti temu bisnis peningkatan kerjasama investasi UMKM		50 pelaku usaha					
1.17.01.01.16.16	Bazar inovasi produk UMKM	Jenis produk UMKM		3 jenis					
1.17.01.01.16.17	Pemasaran dan peningkatan nilai jual produk UMKM kalbar	Jenis produk yang dipasarkan		5 jenis					
1.17.01.01.16.19	Peningkatan pelayanan PLUT	Jenis pelayanan yang diberikan kepada KUMKM		7 jenis layanan					
1.17.01.01.16.20	Lomba desain inovasi produk UMKM	Jenis produk UMKM yang diperlombakan		2 jenis					
2.17.01	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur / tepat waktu							
		2. % serapan anggaran							
		3. % laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP							
		4. % Pemenuhan Kompetensi Pegawai instansi							
		5. % nilai kepuasan layanan internal							
		6. % tingkat disiplin aparatur							
2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	11 Dokumen	100%	100%	100%			
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen		
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		

2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %			
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan		
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang diverifikasi/jumlah Pengajuan SPM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1 Dokumen				1 Dokumen		
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	1 Dokumen				1 Laporan		
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% pelayanan administrasi kepegawaian sesuai prosedur	7 Dokumen	100%	100%				
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Stel	86 Stel	86 Stel	100%	211 stel		
2.17.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen				3 dokumen		
2.17.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	jumlah dokumen laporan kinerja individu	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 dokumen		
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti diklat minimal 20 JP	20 Orang	6 Orang	6 Orang	100%	20 org		
2.17.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	-	20 Orang	20 Orang	100%	-		
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang	8 Dokumen	100%	100%	100 %			
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	15 Jenis	15 Jenis	100%	36 jenis		
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	61 Jenis	61 Jenis	100%	38 jenis		
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	5 Paket	3 Jenis	3 Jenis	100%	31 jenis		
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Paket	1136 Porsi	1136 Porsi	100%	1136 porsi		
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Cetak dan Pengandaan	1 Paket	9 Jenis 27906 Lembar	9 Jenis 27906 Lembar	100%	40307 lembar		
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	4 Jenis	4 Jenis	100%	4 Jenis		
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Konsultasi PD	1 Dokumen	32 Kali	32 Kali	100%	1 dokumen		
2.17.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-		

2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)			100%	100%	100 %			
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebelair	-		6 Unit	6 Unit	100%	7 Unit		
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit		4 Item	4 Item	100%	7 Jenis		
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	8 Laporan		100%	100%	100 %			
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	1 Laporan		118 Paket	118 Paket	100%	98 bh		
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pelayanan	4 Laporan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bln		
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 Laporan		100%	100%		100 %		
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% BMD dalam kondisi baik	4 Dokumen		100%	100%	100 %			
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 Unit		14 Unit	14 Unit	100%	4 unit		
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	210 Unit		164 Unit	164 Unit	100%	210 unit		
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara dan direhabilitasi	1 Unit		2 Gedung	2 Gedung	100%	1 gedung		
2.17.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		-	-	-	1 gedung		
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Meningkatnya koperasi Bergerak di Bidang Sektor Jasa Keuangan yang memiliki ijin usaha simpan pinjam	91,25%		61,38%	62,26 %	101 %	61,38%		
2.17.02.1.01	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi	100 %		40 Izin	65 izin	163 %	40 Izin		
2.17.02.1.01.01	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	5 izin		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen		
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	5 Ijin		-	-	-	-		

2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 izin	-	-	-	-		
2.17.02.1.02.02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah koperasi yang dapat mengakses Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 izin	-	-	-	-		
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	8%	2%	1,27 %	64%	2%		
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	37%	130 Koperasi	40 Koperasi	50 %	130 Koperasi		
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesympungan, dan Memberi Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesympungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	50 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen		
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	50 Kop	2 Dokumen	-	-	2 Dokumen		
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Prosentase KSP/USP yang diawasi dan diperiksa	56 %	-	-	-	-		
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesympungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesympungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	30 Unit Usaha	-	-	-	-		
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP	25 %	5%	1,27 %	25%	5%		
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi	Prosentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	92.52 %	150 koperasi	40 Koperasi	80 %	150 koperasi		
2.17.04.1.01.01	Penilaian Pemodal, Kualitas, Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri, Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Pemodal, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	50 Kop	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	
2.17.04.1.01.02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah Dokumen Koperasi yang Sehat	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		

2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	95.24 %					100%		
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	100%					100%		
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang meningkat Pemahaman dan Pengetahuannya	450 orang		150 org			450 org		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet	12.96%		3%	12,20 %	407 %	3%		
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase Koperasi yang diberdayakan	97,84%		252 Koperasi	114 Koperasi	47 %	252 Koperasi		
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	150 kop		6 Dokumen	1 Dokumen	17 %	6 Dokumen		
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	193 kop		2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	3 Dokumen		
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Volume Usaha kecil yang meningkat	1,47%		1,37%	0,01 %	0,73 %	1,37%		
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase Usaha Kecil yang diberdayakan	2,36%		2 Persen	0,59 %	29 %	2 Persen		
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	12 Unit Usaha		360 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	56 %	360 Pelaku Usaha		
2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	90 Orang		-	-	-	-		
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1. Presentase Usaha Kecil yang berkembang 2. Presentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya	0,05% 90,28%		0,03% 300	0,04	133%	0,03%		
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	20 pelaku usaha		0.33 %	0,34 %	102 %	0.33 %		

2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1110 Unit Usaha		7 Jenis Usaha	7 Jenis Usaha	100 %	7 Jenis Usaha		
2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	150 Orang	-	-	-	-	-		

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra UPT Pelatihan Koperasi Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Tahun 2023	Relisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target program/ kegiatan/ Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	10=(7/6)	11	10	11=(10/11)
1.17.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
1.17.01.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman Surat Menyurat		1 Tahun						
1.17.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Layanan		3 Jenis Rekening						
1.17.01.02.01.04	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah jasa perizinan kendaraan dinas		2 Unit						
1.17.01.02.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai dan buku cek		900 lbr, 8 buku						
1.17.01.02.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor		36 item						
1.17.01.02.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan		8 jenis cetakan, 10 jenis penggandaan						
1.17.01.02.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		7 item						
1.17.01.02.01.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5 item						
1.17.01.02.01.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga		2 jenis						
1.17.01.02.01.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2 Jenis						
1.17.01.02.01.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman								
1.17.01.02.01.14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah		1 dokumen						
1.17.01.02.01.15	Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan dan Pendukung Perkantoran Lainnya	Terjaganya Keamanan dan Kebersihan di Lingkungan Kantor		-						
1.17.01.02.01.16	Penyediaan Jasa Penatausahaan	Jumlah Jasa penatausahaan keuangan		11 Orang						

	Keuangan dan Barang	dan barang								
1.17.01.01.01.17	Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi	Jumlah Jenis Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi		1 item						
1.17.01.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA									
1.17.01.02.02.07	Pengadaan AC/Kipas Angin	Jumlah Pengadaan AC/Kipas Angin		AC 21 unit, Kipas Angin 3 unit						
1.17.01.02.02.08	Pengadaan Perlengkapan peralatan Kantor	Jumlah Jenis Pengadaan peralatan Kantor								
1.17.01.02.02.09	Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga		4 jenis						
1.17.01.02.02.10	Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah pengadaan instalasi listrik/telepon								
1.17.01.02.02.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi								
1.17.01.02.02.15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi								
1.17.01.02.02.18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		2 Unit						
1.17.01.02.02.20	Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin	Jumlah AC yang terpelihara		11 Unit						
1.17.01.02.02.21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan/Peralatan Kantor yang terpelihara		8 Unit						
1.17.01.02.02.36	Pembangunan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Jabatan	Volume jalan/jembatan lingkungan kantor/rumah jabatan								
1.17.01.02.02.42	Pengadaan Mebleir	Jumlah jenis mebelair		2 jenis						
1.17.01.02.02.43	Pengadaan Mesin Pompa Air	Jumlah mesin pompa air								
1.17.01.02.02.45	Pengadaan Taman	Luas Taman								
1.17.01.02.02.47	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mess/Asrama	Jumlah mess/asrama yang terpelihara								
1.17.01.02.02.61	Pemeliharaan Instalasi Listrik / Telepon	Jumlah instalasi listrik/telepon yang terpelihara		1 unit						
1.17.01.02.02.65	Pemeliharaan Rutin/Berkala Generator	Jumlah Generator yang terpelihara		1 unit						
1.17.01.02.02.70	Rehabilitasi / Peningkatan mess/asrama	Jumlah luas mess/asrama yang direhab		1 paket						
1.17.01.02.02.71	Rehabilitasi / Peningkatan Gedung Tempat Ibadah	Jumlah gedung tempat ibadah								
1.17.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase Meningkatnya Disiplin Aparatur								
1.17.01.01.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas / Kerja dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas /Kerja dan Perlengkapannya								
1.17.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR									

1.17.01.02.05.05	Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Analisis Jabatan		1 Dokumen						
1.17.01.02.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN									
1.17.01.02.06.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan Keuangan		4 Laporan						
1.17.01.02.06.02	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP		1 Dokumen						
1.17.01.02.06.04	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA		2 Dokumen						
1.17.01.02.06.07	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA		2 Dokumen						
1.17.01.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI									
1.17.01.02.15.01	Diklat Manajerial	Jumlah peserta diklat								
1.17.01.02.15.02	Identifikasi Kebutuhan Diklat	Jumlah Jenis Diklat dan SDM yang dibutuhkan untuk mengikuti diklat		1 Dokumen						
1.17.01.02.15.20	Pelatihan Perkoperasian Tentang Manajemen Laporan Keuangan dan Akuntansi Bagi Gerakan Koperasi Se Kalimantan Barat	Peserta yang Mengikuti Pelatihan		150 orang						
1.17.01.02.15.21	Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi Se Kalimantan Barat	Peserta yang Mengikuti Pelatihan		150 orang						
1.17.01.02.15.22	Pelatihan Manajemen Permodalan Bagi Gerakan Koperasi Se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan								
1.17.01.02.16	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN UKM									
1.17.01.02.16.01	Diklat Kewirausahaan	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat								
1.17.01.02.16.02	Diklat Penunjang Lanjutan	Jumlah UKM yang mengikuti Diklat Penunjang Lanjutan		150 orang						
1.17.01.02.16.03	Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan	Jumlah dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan								
1.17.01.02.16.15	Vocational	Jumlah UKM yang Mengikuti Vocational								
1.17.01.02.16.25	Pelatihan Manajemen Permodalan Bagi Gerakan Koperasi dan UMKM di 11 Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan		150 orang	-	-				
1.17.01.02.16.26	Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi UMKM Se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan		150 orang						
1.17.01.02.16.27	Pelatihan Kewirausahaan Tentang Produk Unggulan Bagi UMKM Se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan		150 orang						
1.17.01.02.16.28	Pelatihan Manajemen Kemasan Produk Bagi UMKM Se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan		150 orang						

1.17.01.02.16.29	Pelatihan Pengembangan Usaha Berbasis Gender Bagi UMKM Se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	150 orang						
1.17.01.02.16.30	Pelatihan Kewirausahaan Tentang Bidang Produk hasil laut UMKM di 11 kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	120 orang	-	-				
1.17.01.02.16.31	Peningkatan Kapasitas SDM dan UMKM	Jumlah Tenaga Pendamping	25 orang						
2.17.01	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur / tepat waktu							
		2. % serapan anggaran							
		3. % laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP							
		4. % Pemenuhan Kompetensi Pegawai instansi							
		5. % nilai kepuasan layanan internal							
		6. % tingkat disiplin aparatur							
2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu							
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA – SKPD		1 dok	1 dok	100			
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD		1 dok	1 dok	100			
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen DPPA SKPD		1 dok	1 dok	100			
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan							
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi / jumlah pengajuan SPM		1 dok	1 dok	100			
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu		1 laporan	1 laporan	100			
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu		1 laporan	1 laporan	100			
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan barang							
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor		11 jenis	11 jenis	100			
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		46 jenis	46 jenis	100			

2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan rumah tangga		27 jenis	27 jenis	100			
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistic kantor		308 porsi	308 porsi	100			
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan bahan penggandaan		4044 lembar	4044 lembar	100			
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan		2 jenis	2 jenis	100			
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)							
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebelair		3 jenis	3 jenis	100			
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		63 unit	63 unit	100			
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pelayanan		12 bulan	12 bulan	100			
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%BMD dalam kondisi baik							
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		2 unit	2 unit	100			
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara		46 unit	46 unit	100			
2.17.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara dan direhabilitasi		1 gedung	1 gedung	100			
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya		83,33%	84,85 %	102 %			
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	JumlahPeserta yang Mengikuti Pelatihan		330 org	330 orang	100%			
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang meningkat Pemahaman dan Pengetahuannya		330 org	330 orang	100%			
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Prosentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya		86,67 %	88,10 %	102 %			
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Peserta Usaha Kecil yang mengikuti Pelatihan		1110 org	840 orang	76 %			

2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta yang meningkat Pemahaman dan Pengetahuannya			1110 org	840 orang	76 %			
-----------------	---	--	--	--	----------	-----------	------	--	--	--

2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2018 (th n-3)	Tahun 2019 (th n-2)	Tahun 2020 (th n-1)	Tahun 2021 (th n)	Tahun 2022 (th n+1)	Tahun 2023 (th n+2)	Tahun 2018 (th n-3)	Tahun 2019 (th n-2)	Tahun 2020 (th n-1)	Tahun 2021 (th n)	Tahun 2020 (th n-1)	Tahun 2021 (th n)	Tahun 2022 (th n+1)	Tahun 2023 (th n+2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12		13	14	15		16
1	Prosentase Koperasi Aktif			90.00%						60.17%								
2	Jumlah Pelaku Usaha			112,850						80,546								
3	Prosentase Koperasi Berkualitas			23.00%	23.00%	25.00%				21.72%	23,85%	35,67%		25.00%				
	a. Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif				62.00%	64.00%					60,26%	64,27%		64.00%				
	b. Prosentase Kepatuhan Koperasi				23.00%	25.00%					23,15%	33,79%		25.00%				
	c. Prosentase Kualitas Usaha Koperasi				1.00%	2.00%					9,52%	11,91%		2.00%				
	d. Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya				89.39%	92.96%					94,67%	96,12%		92.96%				
4	Prosentase Usaha Mikro Kecil naik kelas				0.91%	1.82%					0,23%	0,16%		1.82%				
	a. Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina				0.97%	1.94%					1,71%	1,55%		1.94%				
	b. Prosentase Peserta Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil yang meningkatkan pemahamannya				88.88%	90.65%					96,37%	95%		90.65%				
5	Prosentase Volume Usaha Koperasi						11%	12%	13%				13,14 %		11%	12%	13%	
6	Prosentase Koperasi berkualitas						27%	29%	31%				26,28%		27%	29%	31%	

	a. Prosentase koperasi yang memiliki izin usaha						61,38%	74,87%	91,25 %				62,26%		61,38%	74,87%	91,25 %	
	b. Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi						2%	5%	8 %				1,27 %		2%	5%	8 %	
	c. Prosentase Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP						5%	15%	25 %				1,27 %		5%	15%	25 %	
	a. Prosentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet						3%	4%	12,96 %				12,20%		3%	4%	12,96 %	
	e. Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya						83,33%	88,89%	95,24 %				84,85%		83,33%	88,89%	95,24 %	
7	Prosentase pertumbuhan UMKM						5%	7%	9 %				6,98%		5%	7%	9 %	
8	Prosentase Usaha Kecil yang naik kelas						0,24%	0,27%	0,32 %				0,22%		0,24%	0,27%	0,32 %	
	a. Prosentase Volume Usaha kecil yang meningkat						1,37%	1,45%	1,47 %				0,01 %		1,37%	1,45%	1,47 %	
	b. Prosentase Usaha Kecil yang berkembang						0,03%	0,04%	0,05 %				0,04%		0,03%	0,04%	0,05 %	
	c. Prosentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya						86,67%	89,39%	90,28 %				88,10%		86,67%	89,39%	90,28 %	

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah :

1. Prosentase koperasi berkualitas
2. Prosentase Usaha Kecil naik kelas

Secara rinci pencapaian sasaran kinerja diatas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Target Prosentase Koperasi Berkualitas tahun 2020 adalah 25 %, realisasi tahun 2020 adalah 35,67 % atau sebanyak 981 unit, realisasi tercapai karena program kerja yang dijalankan mendukung tercapainya sasaran kinerja, adanya kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi, UKM Prov Kalbar dengan Dinas yang membidangi koperasi di Kabupaten/Kota dalam upaya melakukan pembinaan, pengawasan dan edukasi kepada koperasi agar menjadi koperasi yang berkualitas dalam aspek kelembagaan, aspek usaha, aspek keuangan, aspek manfaat terhadap anggota, aspek manfaat terhadap masyarakat.
2. Target Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas tahun 2020 adalah 1,82%, realisasi tahun 2020 adalah 0,16%, realisasi belum tercapai karena omzet dari usaha menurun dengan terjadinya pandemi Covid-19 dikarenakan daya beli masyarakat menurun.

2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 tahun kedepan (tahun 2018-2023) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya tahun 2013-2018 dan perlu penyelesaian secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan sebelumnya, maka diperoleh 1 (satu) isu-isu strategis yang ada di bidang koperasi usaha kecil dan menengah yang menjadi fokus atau dasar dalam proses pencapaian visi misi gubernur khusus pada misi empat yaitu ***mewujudkan masyarakat sejahtera***, adapun isu-isu tersebut adalah sebagai berikut :

- Masih rendahnya daya saing kualitas Koperasi dan UMKM

Dari isu tersebut diatas, maka bagaimana upaya yang akan dilakukan agar koperasi berkualitas terus meningkat jumlahnya melalui program kegiatan yang menunjang sehingga koperasi-koperasi dapat berhasil guna dan berdaya guna, dikelola oleh anggota dan masyarakat secara optimal sesuai aturan-aturan perkoperasian sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya anggota koperasi.

Sedangkan untuk UMKM program kegiatan diarahkan bagaimana meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar atau usaha kecil menengah naik kelas sehingga dapat mengurangi permasalahan ekonomi secara umum yaitu mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja, sehingga meningkatkan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sesuai misi empat yaitu *mewujudkan masyarakat sejahtera* sesuai dengan visi misi Gubernur.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.4.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

RANCANGAN AWAL						HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.17.01	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur / tepat waktu 2. % serapan anggaran 3. % laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP 4. % Pemenuhan Kompetensi Pegawai instansi 5. % nilai kepuasan layanan internal 6. % tingkat disiplin aparatur		100%	5.688.320.803	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur / tepat waktu 2. % serapan anggaran 3. % laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP 4. % Pemenuhan Kompetensi Pegawai instansi 5. % nilai kepuasan layanan internal 6. % tingkat disiplin aparatur		100%	5.688.320.803
2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur/tepat waktu		100%	94.184.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	94.184.300
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pontianak	3 Dok	16.245.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja	Pontianak	3 Dok	16.245.000
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	1 dok	11.592.500	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pontianak	1 dok	11.592.500
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pontianak	1 dok	10.655.300	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pontianak	1 dok	10.655.300
2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	1 dok	10.757.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pontianak	1 dok	10.757.500
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	4 Laporan	22.773.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pontianak	4 Laporan	22.773.000
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	1 Laporan	22.161.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pontianak	1 Laporan	22.161.000
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan		4 Laporan	246.810.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan		4 Laporan	246.810.000
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	Pontianak	12 bulan	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	Pontianak	12 bulan	-
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	1 dok	222.240.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pontianak	1 dok	222.240.000
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pontianak	1 Lap	6.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pontianak	1 Lap	6.150.000

2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	1 Lap	18.420.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pontianak	1 Lap	18.420.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat disiplin aparatur		100%	239.800.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat disiplin aparatur		100%	239.800.000
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pontianak	60 stel	45.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Pontianak	60 stel	45.000.000
2.17.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pontianak	3 dok	34.800.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pontianak	3 dok	34.800.000
2.17.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	2 dok	10.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pontianak	1 lap	10.000.000
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	20 orang	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pontianak	20 orang	150.000.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai Kepuasan Layanan Internal		100%	581.622.539	Administrasi Umum Perangkat Daerah	nilai Kepuasan Layanan Internal		100%	581.622.539
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pontianak	8 paket	16.634.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pontianak	8 paket	36.634.200
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	5 paket	152.574.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pontianak	5 paket	152.574.600
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pontianak	5 paket	133.867.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pontianak	5 paket	133.867.000
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pontianak	2 Paket	68.160.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pontianak	2 paket	68.160.000
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pontianak	2 Paket	29.904.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Pontianak	2 Paket	29.904.600
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pontianak	1 Dok	11.040.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Pontianak	1 Dok	11.040.000
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	1 dok	133.403.539	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pontianak	1 dok	133.403.539
2.17.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	1 dok	16.400.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pontianak	1 dok	16.400.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar		100%	255.237.700	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar		100%	255.237.700
2.17.01.1.07.05						Pengadaan mebel	Jumlah Pengadaan mebel	Pontianak	-	-
2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pontianak	17 Unit	255.237.700	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pontianak	17 Unit	255.237.700
2.17.01.1.07.11						Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Pontianak	-	-
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai Kepuasan Layanan Internal		100%	1.293.165.924	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	nilai Kepuasan Layanan Internal		100%	1.293.165.924
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	1 Lporan	7.990.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pontianak	1 Lporan	7.990.000
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pontianak	4 Laporan	355.981.092	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pontianak	4 Laporan	355.981.092

2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pontianak	7 Laporan	929.194.832	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pontianak	7 Laporan	929.194.832
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar		100%	136.098.880	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas sesuai standar		100%	352.728.181
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pontianak	5 unit	47.800.000	Penyediaan Jasa Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pontianak	5 unit	47.800.000
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pontianak	210 unit	89.530.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pontianak	210 unit	89.530.000
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pontianak	1 gedung	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pontianak	1 gedung	20.000.000
2.17.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pontianak	1 gedung	62.100.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pontianak	1 gedung	62.100.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Meningkatnya koperasi Bergerak di Bidang Sektor Jasa Keuangan yang memiliki ijin usaha simpan pinjam		91.25%	175.153.600	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase Meningkatnya koperasi Bergerak di Bidang Sektor Jasa Keuangan yang memiliki ijin usaha simpan pinjam		91.25%	175.153.600
2.17.02.1.01	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi		100%	75.156.000	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi		100%	75.156.000
2.17.02.1.01.01	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Pontianak	5 izin	75.154.000	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Pontianak	5 izin	75.154.000
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Pontianak	5 izin	99.999.600	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi	Pontianak	5 izin	99.999.600
2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pontianak	5 izin	49.999.800	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pontianak	5 izin	49.999.800
2.17.02.1.02.02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah koperasi yang dapat mengakses Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pontianak	5 izin	49.999.800	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah koperasi yang dapat mengakses Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pontianak	5 izin	49.999.800
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi		8 %	240.478.800	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi		8 %	240.478.800
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase koperasi yang diawasi dan diperiksa		37 %	160.478.500	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase koperasi yang diawasi dan diperiksa		37 %	160.478.500

2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberi Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Barat	50 Dok	87.603.000	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberi Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Barat	50 Dok	87.603.000
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Pontianak	50 Unit USaha	72.875.500	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Pontianak	50 Unit USaha	72.875.500
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase KSP/USP yang diawasi dan diperiksa	Provinsi Kalimantan Barat	56 %	80.000.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase KSP/USP yang diawasi dan diperiksa	Provinsi Kalimantan Barat	56 %	80.000.000
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Barat	30 Unit Usaha	80.000.000	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	Provinsi Kalimantan Barat	30 Unit Usaha	80.000.000
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP		25%	216.000.400	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP		25%	216.000.400
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi	Prosentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya		92,59%	216.000.400	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya		92,59%	216.000.400
2.17.04.1.01.01	Penilaian Pemodal, Kualitas, Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri, Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Pontianak	50 kop	216.000.400	Penilaian Pemodal, Kualitas, Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri, Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Pontianak	50 kop	216.000.400
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya			
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Prosentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian			
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)	Jumlah Peserta yang meningkat Pemahaman dan Pengetahuannya	Pontianak			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH)	Jumlah Peserta yang meningkat Pemahaman dan Pengetahuannya	Pontianak		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet		12,96%	1.208.852.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet		12,96%	1.208.852.900
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase Koperasi yang diberdayakan		97,84%	1.208.852.900	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Prosentase Koperasi yang diberdayakan		97,84%	1.208.852.900

2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	Kabupaten/ Kota	150 kop	844.790.300	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	Kabupaten/ Kota	150 kop	844.790.300
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten/ Kota	193 kop	364.062.600	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten/ Kota	193 kop	364.062.600
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Volume Usaha kecil yang meningkat		1,47%	573.965.840	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Volume Usaha kecil yang meningkat		1,47%	573.965.840
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase Usaha Kecil yang diberdayakan		2,36%	573.965.840	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Prosentase Usaha Kecil yang diberdayakan		2,36%	573.965.840
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pontianak	12 Unit Usaha	348.935.140	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pontianak	12 Unit Usaha	348.935.140
2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Pontianak	90 Orang	225.030.700	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Pontianak	90 Orang	225.030.700
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2. Presentase Usaha Kecil yang berkembang 3. Prosentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya		0,05% 90,28%	343.619.100	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4. Presentase Usaha Kecil yang berkembang Prosentase Peserta Pelatihan UMKM yang Meningkatkan Pemahamannya		0,05% 90,28%	343.619.100
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi usaha menengah		20 pelaku usaha	343.619.100	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi usaha menengah		20 pelaku usaha	343.619.100
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Pontianak	1110 Unit Usaha	318.779.400	Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Pontianak	1110 Unit Usaha	318.779.400
2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Pontianak	150 Orang	24.839.700	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Pontianak	150 Orang	24.839.700
TOTAL					5.688.320.803					
					5.688.320.803					

2. 5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023, tidak terdapat usulan program, kegiatan maupun sub kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan tetapi berupa program dan kegiatan yang telah menjadi tugas dan Tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan amanat Permendagri 90 tahun 2019. Namun di dalam item kegiatan sedikit mengalami perubahan, dimana adanya item-item kegiatan yang menyesuaikan dengan hasil asistensi bersama Gubernur yang dianggap dapat mendorong peningkatan pertumbuhan dan pengembangan KUMKM di Kalimantan Barat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu : 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian pada Tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi yang dilaksanakan dengan strategi :

1. Meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha;
2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan

- UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/pembiayaan;
3. Meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;
 4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 – 2024;
 5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan, UMKM dan koperasi termasuk sentra Industri Kecil Menengah (IKM) diarahkan: sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur. Selain itu, RPJMN Tahun 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja serta kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong. Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan bagi Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut, terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode Tahun 2020-2024, yaitu :

Agenda ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

Pada agenda pembangunan ini, salah satu sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun akan datang dan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Arah kebijakan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dan Koperasi.

Agenda ke-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2. Distribusi pusat-pusat Pertumbuhan Ke Wilayah (PKW) belum berkembang;
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berbasis (IPTEK) kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
5. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

Upaya untuk mengurangi daerah tertinggal masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan pendukung ekonomi di daerah tertinggal, akibatnya kapasitas sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal. Sebagai salah satu upaya pencapaian tujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, menjadi prasyarat dibutuhkan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dan masyarakat. Strategi yang digunakan dalam kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan adalah strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan.

Strategi pertumbuhan adalah strategi berbasis ekonomi yang dilaksanakan pada daerah-daerah yang memiliki daya kompetitif yang tinggi dengan mendorong operasionalisasi dan meningkatkan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan. Sementara itu strategi pemerataan adalah strategi yang mendorong pertumbuhan pusat-pusat aktivitas melalui: 1. pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian dengan memperhatikan karakteristik aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi, dan 2. pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi.

3. 2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan untuk periode 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Renstra didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Provinsi Kalimantan Barat.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat secara nyata, dalam jangka waktu tahunan sampai 5 (lima) tahun mendatang, berikut tujuan dan sasaran, indikator

dan target indikator jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang mandiri, Produktif dan berdaya saing		Prosentase Koperasi Berkualitas	23%	25%			
			Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas	0,91 %	1,82 %			
		1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif	62,00%	64,00%			
			Prosentase Kepatuhan Koperasi	23,00%	25,00%			
			Prosentase Kualitas Usaha Koperasi	1,00%	2,00%			
			Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang meningkat pemahamannya	89,39%	92,96%			
		2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	0,97%	1,94%			
			Prosentase Peserta Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil yang meningkat pemahamannya	88,88%	90,65%			
2	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang berdaya saing		Prosentase Volume Usaha Koperasi			11%	12%	13%
			Prosentase Pertumbuhan UMKM			5%	7%	9%
		1. Meningkatnya Kualitas Koperasi	Prosentase Koperasi Berkualitas			27%	29%	31%
			2. Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	Prosentase Usaha Kecil yang naik kelas			0,24%	0,27%

3. 3. Program dan Kegiatan

Mengacu kepada kebijakan Pemerintah Pusat dalam menjalankan pembangunan koperasi usaha mikro kecil menengah di daerah serta berpedoman pada kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan mempertimbangkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Untuk kegiatan bidang perkoperasian khususnya dalam rangka penguatan kelembagaan koperasi dan menjadikan koperasi aktif dan berkualitas kegiatan dilaksanakan di

kabupaten kota dan fokus pendataan dan pembinaan kepada koperasi tidak aktif agar menjadi aktif, dan mempertahankan koperasi aktif agar tetap aktif dan berkualitas. Memfokuskan pada pengembangan koperasi-koperasi sektor riil seperti koperasi produksi di bidang pertanian, perkebunan serta nelayan yang terfokus di kawasan/daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka pengawasan koperasi diarahkan kepada seluruh jenis koperasi (produksi, Konsumen, pemasaran, KSP, jasa) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bidang perkoperasian menuju koperasi sehat, kuat dan mandiri.

Di bidang UMKM kegiatan lebih terfokus pada bagaimana mengembangkan UMKM agar naik kelas melalui kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM agar menjadi lebih baik dan dapat bersaing dengan produk luar bahkan ke luar negeri.

Dalam meningkatkan kualitas produksi dan sumber daya manusia KUMKM, dan menjadi koperasi aktif dilaksanakan pelatihan-pelatihan baik dilaksanakan di provinsi/kabupaten/kota.

Untuk tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat adalah 7 (tujuh) Program, 15 (lima belas) Kegiatan, 42 (empat puluh dua) Sub Kegiatan.
2. Pagu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar Rp. 5.688.320.803,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan dengan Pagu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebesar Rp. 5.688.320.803,- dengan rincian Program dan Kegiatan Renja 2023 adalah sebagai berikut :

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi	Pagu Indikatif	
		Indikator Program	Keluaran Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan			
			Indikator	Target	Indikator			Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DINAS KOPERASI, UKM							5.688.320.803
2.17.01	PROGRAM PENUNJANGAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1. Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan sesuai dengan prosedur / tepat waktu 2. % seraan anggaran 3. % laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP 4. % Pemenuhan Kompetensi Pegawai instansi 5. % nilai kepuasan layanan internal 6. % tingkat disiplin aparatur						3.095.217.023
2.17.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% penyusunan perencanaan kinerja dan keuangan tepat waktu	100%				94.184.300
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah dokumen perencanaan kinerja	3 Dok	Pontianak	16.245.000
2.17.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Jumlah dokumen RKA – SKPD	1 dok	Pontianak	11.592.500
2.17.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dok	Pontianak	10.655.300
2.17.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Jumlah dokumen DPPA SKPD	1 dok	Pontianak	10.757.500
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Laporan Kinerja	2 dok	Pontianak	22.773.200
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 dok	Pontianak	22.161.000
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan	4 Laporan				246.810.000
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	12 bulan	Pontianak	0
2.17.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD				Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi / jumlah pengajuan SPM	1 dok	Pontianak	222.240.000
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD				Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun	1 lap	Pontianak	6.150.000
2.17.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD				Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	1 lap	Pontianak	18.420.000

2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Tingkat disiplin aparatur	100%				239.800.000
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Reserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah pengadaan pakaian dinas	61 stel	Pontianak	45.000.000
2.17.01.1.05.03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 dok	Pontianak	34.800.000
2.17.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dok	Pontianak	10.000.000
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	Pontianak	150.000.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Barang dan Penyusunan Perencanaan Kinerja dan Keuangan	100%				581.622.539
2.17.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Pontianak	36.634.200
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	Pontianak	152.574.600
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	Pontianak	133.867.000
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	Pontianak	68.160.000
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Pontianak	29.902.600
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dok	Pontianak	11.040.000
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultan SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	Pontianak	133.403.539
2.17.01.1.06.09	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dok	Pontianak	16.400.000
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		% Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tugas (komulatif tahun berjalan)	100%				255.237.700
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel				Jumlah pengadaan mebelair	-	Pontianak	-

2.17.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesiin Lainnya				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 item	Pontianak	255.237.700
2.17.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	Pontianak	-
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%				1.293.165.924
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Pontianak	7.990.000
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan	Pontianak	355.981.092
2.17.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	Pontianak	929.194.832
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD dalam kondisi baik	100%				352.728.181
2.17.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeriksaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	Pontianak	47.800.000
2.17.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit	Pontianak	89.530.000
2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Pontianak	20.000.000
2.17.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Pontianak	62.100.000
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Prosentase meningkatnya jumlah koperasi yang memiliki ijin usaha simpan pinjam		91.25 %				175.153.600
2.17.02.1.01	Penerbitan izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	5 Unit				75.156.000

2.17.02.1.01.01	Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				Jumlah izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi	5 ijin	Pontianak	75.154.000
2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Unit Usaha				99.999.600
2.17.02.1.02.01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Jumlah izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi	5 Izin	Pontianak	. 49.999.800
2.17.02.1.02.02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Jumlah koperasi yang dapat mengakses Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 unit usaha	Pontianak	. 49.999.800
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Tingkat Kepatuhan Koperasi		8 %				240.478.500
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Prosentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	37 %				240.478.500
2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberi Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	50 dok	Kabupaten/Kota	87.603.000
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	50 kop	Kabupaten/Kota	72.875.500
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
2.17.03.1.02.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat				Jumlah Koperasi yang Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat	30 kop		80.000.000

2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP		25 %				216.000.500
2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi		Prosentase koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya	94 %				216.000.400
2.17.04.1.01.01	Penilaian Pemodalan, Kualitas, Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri, Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi				Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	50 kop	Kabupaten/Kota	216.000.400
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya						0
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Prosentase Peserta yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian	100%				0
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	450 org	Pontianak	0
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Koperasi yang meningkat jumlah Omzet						1.208.852.900
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Prosentase Koperasi yang diberdayakan	97,84%				1.208.852.900
2.17.06.1.01.01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi usaha	150 kop	Pontianak	844.790.300
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	193 kop	Pontianak	364.062.600
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Presentase Volume Usaha kecil yang meningkat						573.965.840
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		Prosentase Usaha Kecil yang diberdayakan	2,36%				573.965.840
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan,	12 Unit Usaha	Pontianak	348.935.140

					Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			
2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan				Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	90 orang		225.030.700
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Kecil yang berkembang						343.619.100
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi usaha menengah	20 pelaku usaha				343.619.100
				100%				
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	1110 Unit Usaha	Pontianak	318.779.400
2.17.08.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM				Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	150 orang		24.839.700

BAB V PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 ini dibuat dalam rangka menjaga konsistensi dari kebijakan yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, serta untuk mensinkronkan Renja Tahun 2023 Dinas yang membidangi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kab/Kota Se Kalimantan Barat.

Selanjutnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan. Dengan ketersediaan dana yang ada dapat mengoptimalkan pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan dengan hasil kinerja yang dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya dan masyarakat perkoperasian dan UMKM pada khususnya.

Pontianak, Juni 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Barat


Ir. Ansfridus Juliardi Andjioe, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199311 1 002